

# SISTEM AGRIBISNIS KELAPA SAWIT DI INDONESIA

**ISKANDARINI**  
**Fakultas Pertanian**  
**Jurusan Sosial Ekonomi**  
**Universitas Sumatera Utara**

## A. Latar Belakang

Kelapa sawit yang berasal dari Afrika Barat ternyata dapat berkembang dengan baik di Indonesia. Didatangkan pertama sekali pada tahun 1848 oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai tanaman hias di Kebun Raya Bogor dan sepanjang jalan di Deli, sehingga potensi yang sesungguhnya belum kelihatan. Mulai tahun 1911 barulah kelapa sawit dibudidayakan secara komersial yang dirintis oleh *Adrien Hallet (Belgia)* yang diikuti oleh *K. Schadt (Jerman)* yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Sejak lahirnya perkebunan komersial tersebut (1911) hingga kini perkembangan perkebunan kelapa sawit (usaha agribisnis kelapa sawit) mengalami naik turun :

- » Selama masa penjajahan Belanda (1911 – 1938) perkembangan perkebunan besar kelapa sawit berkembang dengan baik ditandai dengan :
  - Areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia bertambah luas.
  - Mampu mendirikan pabrik pemrosesan minyak sawit yang modern dan balai-balai penelitian kelapa sawit.
  - Ekspor minyak sawit yang mampu mengungguli negara-negara Afrika Barat selaku pengeksport utama minyak sawit dunia masa itu.
- » Masa pendudukan Jepang, luas areal dan produksi perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami penurunan yang tajam. Bahkan tahun 1943 pemerintah Pendudukan Jepang menghentikan secara keseluruhan produksi perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia.
- » Pada masa pertempuran fisik, beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan perkembangan keberadaan perkebunan kelapa sawit dapat digambarkan sebagai berikut :
  - Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan banyak laskar pemuda yang saling berebut wilayah perkebunan guna memperkuat perjuangan organisasinya masing-masing. Akhirnya perkebunan tersebut dikelola dengan manajemen masing-masing.
  - Menjelang akhir 1948 banyak perkebunan yang mengalami kerusakan karena peperangan, kemudian melalui aksi militernya Belanda kembali merebut perkebunan-perkebunan tersebut dan mengembalikannya kepada "*pemilik*" semula (swasta asing).
  - Akibat dua kejadian di atas maka luas areal dan produksi kelapa sawit mengalami penurunan yang tajam.
- » Masa pengalihan perkebunan asing oleh pemerintah Indonesia yang di mulai pada 10-12-1957. Perubahan manajemen dan kondisi politik dan keamanan yang belum stabil tidak mampu membangun kembali produksi kelapa sawit Indonesia.

- » Masa Orde Baru yang ditandai dengan situasi politik dan keamanan yang kondusif memungkinkan pemerintah beserta lebih mampu menilai segala sumber daya yang dimilikinya. Salah satu sumber daya itu adalah sub-sektor perkebunan yang dahulu belum mampu dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.

Sub-sektor perkebunan memang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk beberapa hal :

1. Menciptakan kesempatan kerja dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Sumber perolehan devisa dan sekaligus untuk penghematan devisa.

Dalam hal sistem agribisnis kelapa sawit terdapat beberapa kebijaksanaan upaya perbaikan dan pola pengembangan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung perkembangan sub-sektor perkebunan kelapa sawit antara lain :

1. Sejak tahun 1967, perusahaan perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh dua perusahaan yaitu perusahaan perkebunan negara dan perusahaan perkebunan swasta. Dominasi perusahaan perkebunan atas kelapa sawit ini berakhir pada tahun 1975, yakni saat masyarakat tani Aek Nabara, Labuhan Batu, Sumatera Utara diberi kesempatan membudidayakan kelapa sawit dengan menjadi peserta "*Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara (P3RSU)*".
2. Memperkenalkan Pola Perusahaan Inti Rakyat dalam bentuk Proyek NES/PIR Bun pada tahun 1977/1978, yakni PIR Lokal, PIR Khusus, PIR Berbantuan, PIR Trans.
3. Sejak 16 Desember 1978 pemerintah ikut campur tangan dalam pemasaran komoditas kelapa sawit antara lain dengan cara mengatur jumlah dan harga alokasi minyak sawit untuk industri di dalam negeri (industri minyak goreng, mentega, shortening, sabun, oleokimia). Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perdagangan, dan Koperasi, Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian. Produsen CPO yang terkena ketentuan SKB tersebut adalah semua PN/PTP dan enam perusahaan perkebunan swasta yang pada tahun itu telah menjadi produsen. Mereka diwajibkan untuk menyeter 35 % produksi *Crude Palm Oil* (CPO) ke Industri di dalam negeri dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian SKB ini diakhiri pada 3 Juni 1991 (Pak Jun 1991).
4. Pola pengembangan perkebunan, baik untuk PN/PTP maupun PBSN/PBSA, antara lain berupa perluasan kebun kelapa sawit dan fasilitas kredit PBSN.

Kemudian sejalan dengan salah satu tujuan dari pembangunan industri dalam program pembangunan lima tahunan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan daya saing industri dan meningkatkan pangsa pasar khususnya bagi komoditas ekspor serta menjembatani sektor industri dan sektor-sektor lainnya. Sementara itu dalam sektor perdagangan pemerintah terus melanjutkan usaha untuk meningkatkan ekspor komoditas non-migas. Dalam hal inilah pengembangan dan pembangunan industri CPO menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai tujuan di atas.

Industri minyak sawit yang berkembang pesat sejak tahun 1970 semakin memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Produksi CPO yang pada tahun 1970 hanya 216.827 ton meningkat secara tajam menjadi 2.658.838 ton pada tahun 1991 dan mencapai 6.640.000 ton pada tahun 1999. Tingkat pertumbuhan produksi minyak sawit ini masih tetap diharapkan meningkat untuk masa-masa berikutnya sebagai salah satu primadona ekspor di luar migas dan sekaligus sebagai usaha untuk mengejar posisi Malaysia sebagai produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar.

Melihat produksi CPO yang begitu meningkat dan besar kiranya dapat kita bayangkan bahwa pelaku-pelaku ekonomi yang bergerak dalam bidang agribisnis akan menikmati keuntungan besar dan sub sektor ini akan mampu memberikan sumbangan devisa yang besar bagi pendapatan pemerintah.

Namun pada kenyataannya hal ini tidak terjadi. Sangat banyak masalah yang dihadapi oleh sistem agribisnis kelapa sawit ini :

- » Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Yang Tidak Mencapai Sasaran.
- » Pajak Ekspor Minyak Sawit.
- » Sistem Pemasaran Minyak Sawit.
- » Pemberian Izin Perluasan Areal Tanam Kelapa Sawit Bagi Investasi PMA.
- » Peningkatan Taraf Hidup Produsen Yang Belum Terwujud.

Sehingga muncul pertanyaan apa yang salah dalam sistem agribisnis Kelapa Sawit Indonesia.

## **B. Uraian Teoritis**

### **1. Pengertian Agribisnis dan Sistem Agribisnis**

Semakin bergemanya kata agribisnis ternyata belum diikuti dengan pemahaman yang benar tentang agribisnis itu sendiri. Sering ditemukan bahwa agribisnis diartikan sempit yaitu perdagangan atau pemasaran hasil pertanian. Padahal pengertian agribisnis tersebut masih jauh dari konsep semula yang dimaksud.

Konsep agribisnis sebenarnya adalah suatu konsep yang utuh, mulai dari proses produksi, mengolah hasil, pemasaran dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Menurut *Arsyad, dkk* (1985) yang dimaksud dengan agribisnis adalah "*Suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Yang dimaksud dengan adanya hubungannya dengan pertanian dalam arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian.*"

Menurut *Davis* dan *Goldberg*, agribisnis adalah totalitas dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi dari input pertanian, kegiatan produksi di usaha tani, penyimpanan, pengolahan dan distribusi komoditi pertanian dan barang-barang yang dibuat dari barang-barang pertanian tersebut.

## 2. Sub Sistem Agribisnis

Dari definisi konsep agribisnis maka untuk setiap komoditi pertanian terjadi hal-hal berikut :

### a. Kegiatan Utama

Terjadi kegiatan berurutan secara vertikal, yaitu :

#### » **Pengadaan Input Produksi**

Dalam menunjang keberhasilan agribisnis, maka tersedianya bahan baku (faktor/input produksi) pertanian secara kontinu dalam jumlah yang tepat diperlukan. Tersedianya input produksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti macam komoditi, luas lahan, tenaga kerja, modal, manajemen, iklim dan faktor sosial ekonomi produsen. Namun patut diperhitungkan bahwa keberhasilan agribisnis ini juga dipengaruhi oleh kondisi setempat mengingat sifat pertanian yang adaptasinya tergantung pada kondisi setempat (*local spesifik*).

Yang dimaksud dengan faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi ini dikenal dengan istilah *input production factor* atau korbanan produksi. Dalam berbagai pengalaman menunjukkan bahwa faktor-faktor produksi, lahan, modal untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja dan aspek manajemen adalah faktor produksi yang terpenting diantara faktor produksi yang lain.

Dalam manajemen agribisnis pemanfaatan faktor produksi ini harus memperhatikan prinsip optimalisasi penggunaan faktor produksi yaitu prinsip bagaimana menggunakan faktor produksi tersebut seefisien mungkin dalam hal :

- Efisiensi teknis : Faktor produksi yang dipakai menghasilkan produksi maksimum.
- Efisiensi Harga : Kalau nilai dari produk marginal sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan.
- Efisiensi Ekonomi : Kalau usaha pertanian tersebut mencapai efisiensi teknis dan sekaligus juga mencapai efisiensi harga.

#### » **Kegiatan Produksi Usaha Tani (Farm Production)**

Dalam mencapai hasil yang baik dalam pertanian juga tergantung kepada teknik budidaya komoditas yang terkait. Dalam hal ini tahapan budidaya itu sendiri mengandung beberapa kegiatan seperti :

- Pembukaan Areal Pertanian.
- Penanaman yang meliputi persiapan lahan, pemilihan bibit, penentuan waktu tanam, penetapan cara, susunan dan jarak tanam.
- Perawatan yang meliputi pemberantasan hama, pemangkasan, pemupukan.

Dalam mencapai keberhasilan produksi pertanian (*farm production*) perlu diperhatikan faktor-faktor :

- Teknologi yang tersedia yang dapat berupa, hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri dan luar negeri, hasil-hasil pengalaman petani/pengusaha lain, dan hasil-hasil pengalaman sendiri.
- Tersedianya input produksi dan biaya input produksi yang wajar.

- Kemampuan sumber daya manusia yang mengelola baik pada tingkat manager, operator atau ketersediaan tenaga terlatih.
- Keadaan sumber daya alam seperti iklim, kesuburan tanah. Dalam hal ini dapat diantisipasi melalui penguasaan teknologi.
- Keadaan manajemen internal perusahaan dalam hal ketepatan perencanaan, keadaan organisasi, manajemen produksi, manajemen personalia, manajemen keuangan, serta manajemen administrasi.
- Kelancaran angkutan, biaya angkutan dan biaya-biaya lain.

» **Pengolahan Hasil**

Pengolahan hasil pertanian adalah perlakuan (*treatment*) terhadap hasil panen sejak dipanen sampai dikonsumsi.

**Pengolahan ini dapat dibagi atas :**

- Perlakuan pasca panen (*Post Harvest Processing*) seperti pendinginan (sayur, ikan), pemberian bahan kimia (*anti coagulant terhadap latex*), pembersihan (*disinfestasi*), pengapuran, pematangan (buah), dan pencegahan terhadap kerusakan yang diakibatkan matahari, air, hujan dan lain-lain.
- Pengolahan primer (*primary processing*) seperti pengolahan CPO, pembuatan *crumb rubber*, pengolahan biji kakao, pembekuan seperti udang, penggergajian kayu, pengalengan, pembuatan sirup.
- Pengolahan sekunder (*secondary processing*) yang biasa di Indonesia dimasukkan sebagai kegiatan industri seperti pembuatan minyak goreng *olein, stearin, glycerol*, pembuatan barang-barang karet, pembuatan tepung jagung dan minyak jagung.

**Tujuan pengolahan hasil pertanian adalah :**

- Mengawetkan bahan baku yang mudah busuk seperti buah-buahan, sayuran, ikan dan hasil-hasil peternakan.
- Merubah bentuk seperti kayu balok menjadi broti, latex menjadi RSS atau *crumb rubber*.
- Membersihkan, mengupas kulit dan mengurangi kadar air seperti padi, jagung, biji pinang, biji kopi.
- Mengambil sari atau bagian yang penting seperti sari buah, CPO dan inti kernel.
- Merubah bentuk kimia menjadi barang-barang baru seperti margarine, sabun detergent, komestik, dan lain-lain.

Komponen pengolahan hasil pertanian menjadi penting karena pertimbangan sebagai berikut :

- Meningkatkan Nilai Tambah  
Dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengolahan hasil yang baik yang dilakukan produsen dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian yang diproses. Kegiatan pengolahan hasil dapat dijadikan sebagai mata rantai bisnis, sebab dengan pengolahan yang baik maka nilai tambah barang pertanian menjadi meningkat karena produk tersebut mampu menerobos pasar baik pasar domestik maupun pasar luar negeri.
- Meningkatkan Kualitas Hasil  
Pengolahan hasil pertanian akan mampu meningkatkan kualitas hasil pertanian yang pada umumnya mudah rusak. Pada akhirnya peningkatan kualitas ini akan berpengaruh besar kepada peningkatan harga produk pertanian tersebut.
- Penyerapan Tenaga Kerja

Pengadaan usaha pengolahan hasil-hasil pertanian tentunya akan membutuhkan tenaga kerja yang untuk komoditi tertentu justru membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar.

- Meningkatkan Keterampilan  
Dengan keterampilan mengolah hasil, maka akan terjadi peningkatan keterampilan secara kumulatif sehingga pada akhirnya akan memperoleh hasil penerimaan usaha tani yang lebih besar.
- Meningkatkan Pendapatan  
Merupakan konsekuensi logis dari hasil olahan yang baik sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi akan mengakibatkan produsen memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Namun perlu diantisipasi beberapa hambatan yang sering dialami dalam pengembangan usaha pengolahan hasil pertanian seperti :

- Pengadaan bahan baku
- Sentra produksi yang terpencar-pencar, sehingga sulit mengumpulkan bahan baku, biaya pengumpulan mahal.
- Bahan baku tidak seragam dan belum memiliki mutu yang baik.
- Bahan baku yang tidak cukup mendukung untuk usaha mengoperasikan pabrik cukup lama dalam satu tahun misalnya pengalengan buah.
- Bahan baku yang cukup banyak, bermutu seragam dan cukup murah merupakan dasar utama adanya keunggulan komparatif dan kompetitif.
- Teknologi yang belum dikuasai. Banyak bahan baku yang sudah tersedia sesuai kebutuhan tetapi hasil pengolahan tidak mencapai sebagaimana diharapkan karena kurangnya penguasaan teknologi pengolahan yang tepat.
- Masalah modal/investasi. Kegiatan pengolahan hasil pertanian pada umumnya memerlukan modal besar sementara kita ketahui bahwa ketersediaan modal dalam negeri sangat kecil sedangkan modal yang berasal dari luar negeri juga belum cukup banyak yang masuk karena masalah stabilitas politik dan keamanan, sulit dan panjangnya prosedur perizinan dan pendirian usaha joint venture, prasarana yang belum menunjang seperti listrik dan pelabuhan, banyak hal-hal yang menambah biaya (*high cost economy*).
- Pengadaan SDM yang sesuai. Kebutuhan SDM yang sesuai untuk usaha pengolahan terutama tenaga terampil dan tenaga managerial belum cukup tersedia.

#### » **Pemasaran**

Aspek pemasaran memegang peranan yang penting sebab ketika mekanisme pemasaran bekerja baik maka semua pihak yang terlibat akan diuntungkan. Oleh karena itu lembaga pemasaran menjadi sangat penting.

**Menurut Kotler ada lima faktor yang menyebabkan pemasaran itu penting, yaitu :**

- Jumlah produk yang dijual menurun
- Pertumbuhan penampilan perusahaan juga menurun
- Terjadinya perubahan keinginan konsumen
- Kompetisi yang semakin tajam
- Terlalu besarnya pengeluaran untuk penjualan

Dalam pemasaran hasil pertanian pemasarannya akan dipengaruhi oleh ciri-ciri hasil pertanian yang bersifat musiman, selalu segera, mudah rusak, jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif sedikit, lokal dan spesifik. Oleh karena itu sering

terjadi harga produksi pertanian yang dipasarkan menjadi naik turun secara tajam. Dalam hal ini yang paling dirugikan adalah pihak produsen (petani), karena kejadian semacam ini maka petani memerlukan kekuatan dan dukungan dalam melaksanakan pemasaran ini.

**Untuk komoditi pertanian, pemasaran terjadi bukan saja ditentukan oleh lima aspek yang ditemukan oleh *Kotler* tapi juga aspek lain seperti :**

- Kebutuhan yang mendesak. Seringkali ditemukan petani yang sangat membutuhkan uang kontan sesegera mungkin sehingga petani akan memasarkan produksi pertaniannya meskipun harganya tidak menguntungkan.
- Tingkat komersialisasi produsen. Ada juga petani yang memasarkan hasil pertaniannya jika harga yang ditawarkan menguntungkan.
- Aspek Peraturan. Ada juga dijumpai petani yang menjual hasil pertanian karena kondisi peraturan yang mengharuskannya walupun harga tidak menguntungkan.

**Beberapa sebab mengapa pemasaran hasil pertanian tidak memberikan keuntungan yang rasional bagi produsen adalah :**

- Pasar yang tidak bekerja secara sempurna
- Lemahnya informasi pasar
- Lemahnya produsen (petani) dalam memanfaatkan peluang pasar
- Lemahnya posisi produsen untuk melakukan penawaran untuk mendapatkan harga yang baik.
- Produsen melakukan usaha tani tidak didasarkan pada permintaan pasar, melainkan karena usaha tani yang diusahakan secara turun-temurun.

Dalam usaha untuk memperluas pasar hasil-hasil pertanian maka perlu kiranya untuk mencoba menembus pasar luar negeri melalui ekspor. Untuk itu sangat perlu diperhatikan :

- Informasi harga internasional
- Nilai tukar uang
- Kuota ekspor-impor
- Kebijakan tarif dan nontarif
- Informasi keinginan/kebutuhan dan preferensi konsumen

## **b. Kegiatan Pendukung**

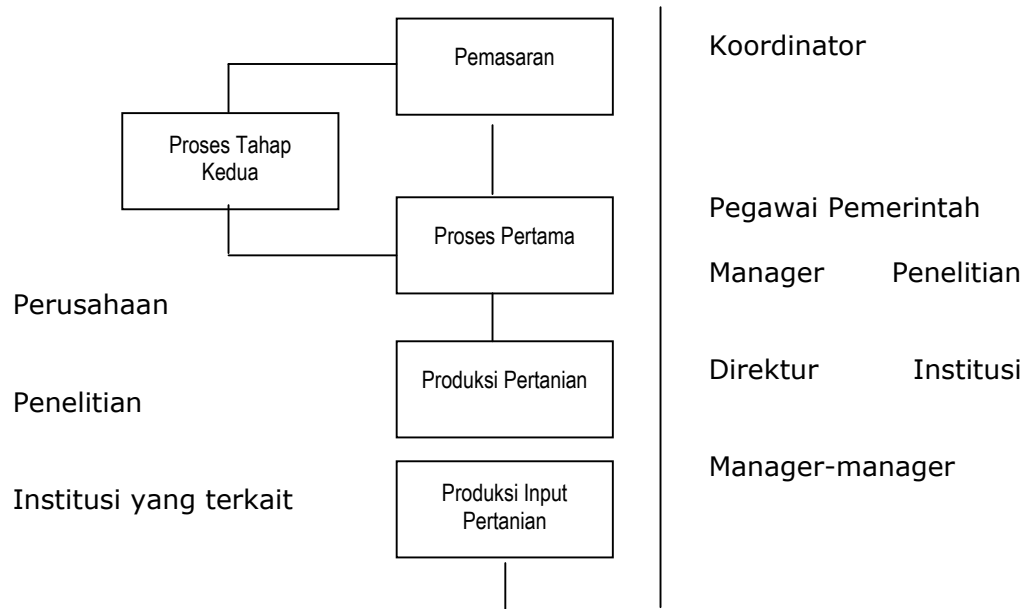
Keberhasilan suatu agribisnis (misalnya agribisnis kelapa sawit) sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan pendukung seperti :

- » ***Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat :***
  - Menghasilkan teknologi baru (bibit unggul, metode baru, alat baru)
  - Menghasilkan informasi pasar, keuangan, dan lain-lain
- » ***Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang akan menciptakan :***
  - Peningkatan kemampuan / skill karyawan / buruh
  - Peningkatan kemampuan operator
  - Kemampuan manajemen
  - Pengembangan Sumber Daya Manusia (moticvasi, etos kerja, kerjasama)

- » **Kegiatan Pengkreditan dan Permodalan yang meliputi :**
  - Sumber-sumber permodalan / kredit untuk pengembangan usaha agribisnis
  - Kelancaran untuk memperoleh kredit
  - Mengurangi biaya-biaya permodalan kredit
  - Mengurangi resiko peminjaman
  
- » **Kegiatan Pengadaan Informasi**
  
- » **Kegiatan Pengangkutan dan Jasa-jasa Perdagangan yang mencakup :**
  - Pengangkutan darat, laut, dan udara
  - Jasa-jasa penunjang pemasaran
  - Jasa-jasa penunjang manajemen, konsultasi, akuntansi dan lain-lain
  
- » **Kegiatan Sarana dan Prasarana Publik seperti listrik, jalan, air, telekomunikasi**
  
- » **Kegiatan Kebijakan Pemerintah melalui :**
  - Undang-undang dan peraturan, pemberian izin, peraturan perpajakan

Kegiatan-kegiatan penunjang dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pihak swasta. Hubungan kegiatan (sub-sistem) penunjang terhadap kegiatan (sub-sistem) utama adalah bersifat horizontal. Artinya untuk setiap satu komoditi akan dibutuhkan satu set sub-sistem penunjang yang sesuai dengan kebutuhan.

  - **Koordinasi**  
Seluruh kegiatan dalam agribisnis harus dikoordinasikan secara harmonis dalam mencapai kinerja yang baik. Semua manager atau pengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam satu atau berbagai kegiatan harus menginformasikannya kepada yang lain untuk menciptakan sinkronisasi dalam usaha membangun bisnis yang berhasil. Semua manager bertindak selaku koordinator atas keseluruhan struktur sistem. Kelompok ini meliputi manager pertanian (lapangan). Pemerintah, Direktur Institusi Penelitian dan Pendidikan, Manager Organisasi-organisasi bisnis yang merupakan komponen dari sistem.



Struktur Vertikal dari Lini Produksi dan Koordinasi Dalam Bidang Agribisnis

Agar mereka dapat menjalankan fungsinya secara efektif, maka koordinator harus diinformasikan tentang apa yang sedang terjadi dan apa sepertinya akan terjadi dalam setiap sub-sistem dalam sistem. Jika koordinator tidak diberi informasi yang tepat maka keputusan yang mereka buat akan mengganggu kinerja perusahaannya dan kemajuan industri dimana perusahaan tersebut bergerak.

Kekuatan hubungan sub-sistem dan kemampuan koordinator dalam menangani semua sub sistem tergantung kepada bagaimana sistem agribisnis diorganisasikan, atau bagaimana suatu sistem agribisnis tersebut diadakan. Oleh karena itu kita dapat mendefinisikan sistem agribisnis sebagai struktur dan metode mengorganisasikan suatu agribisnis dan cara bagaimana setiap sub-sistem berhubungan satu sama lain.

### C. Analisa dan Pembahasan

#### 1. Sistem Agribisnis Kelapa Sawit

Dalam sistem agribisnis kelapa sawit terdapat sub-sistem yang terdiri dari 5 kegiatan, yaitu :

- » Produksi bahan-bahan masukan (*input*)
- » Produksi bahan pertanian (*Farm Production*)
- » Proses tahap pertama (*Primary Processing*)
- » Industri Hilir (*Downstream Industry*)
- » Pemasaran (*Marketing*)

Sementara itu sub-sistem pendukungnya terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti :

- » Penelitian dan Pengembangan
- » Pendidikan dan Perluasan
- » Keuangan dan Jasa Perbankan

- » Asosiasi Petani dan Produsen
- » Dukungan Pemerintah

Sistem agribisnis minyak sawit dapat digambarkan melalui keseluruhan kegiatan-kegiatan, organisasi dan keterkaitan masing-masing sub-sistem.

## 2. Sub-Sistem Kegiatan Utama Sistem Agribisnis

Kegiatan utama sistem agribisnis kelapa sawit itu sendiri terdapat lima kegiatan sub-sistem :

### » **Sub Sistem Bahan-bahan Masukan (*Inputs Productions*)**

Bahan-bahan masukan produksi yang terpenting bagi produksi kelapa sawit adalah bibit tanaman. Kualitas bibit sangat menentukan produksi akhir jenis komoditi ini. Pada umumnya perkembangbiakan tanaman kelapa sawit dilakukan secara generatif yaitu melalui bijinya. Cara ini memang umum dilakukan dan dianggap paling gampang. Akan tetapi, pengadaan bibit dalam jumlah besar dengan cara ini akan mengalami kesulitan antara lain karena bahan bibit yang diperoleh terbatas dan bervariasi. Selain itu tanaman yang berasal dari bibit biji biasanya memerlukan waktu panen yang lebih lama, sehingga secara ekonomis hal ini kurang menguntungkan. Lagi pula sifatnya menyimpang dari sifat induknya. Hal lain yang menjadi bahan pemikiran adalah adanya jenis dan varietas tertentu yang sulit dikedambahkan.

Untungnya melalui kerja keras ahli pembibitan dan peneliti lainnya, Pusat Penelitian Tanaman Perkebunan telah dapat menemukan bibit yang mampu memberikan hasil yang lebih tinggi dan lebih berkualitas. Balai Penelitian juga telah mampu menemukan metode produksi bibit secara kultur jaringan dalam jumlah yang besar. Sebuah pusat penelitian dapat memproduksi bibit tanaman untuk kebutuhan 150.000 ha setiap tahunnya.

Kurangnya pengetahuan dan informasi yang diterima petani mengenai pengadaan bibit unggul kelapa sawit sering menjadi kendala dalam usaha budi daya kelapa sawit. Seiring terjadi bibit liar yang tidak diketahui pasti pohon induknya diperjual-belikan dengan bebas dan dibudidayakan. Akibatnya produksi yang diharapkan tidak dapat maksimal. Bahkan mungkin sebelum menghasilkan tanaman sudah terserang hama atau penyakit.

Bagi orang awam dalam masalah bibit kelapa sawit ini memang sulit membedakan antara bibit unggul dan bibit liar. Untuk itu, maka beberapa tahun yang lalu pemerintah membuat peraturan yang menetapkan tiga Balai Penelitian saja yang diberikan wewenang untuk memproduksi bibit tanaman kelapa sawit yang bersertifikat di Indonesia. Dalam kenyataannya hampir semua bibit dalam negeri dapat disediakan oleh ketiga Balai Penelitian tersebut. Oleh karena itu perlu disosialisasikan kepada petani dan pengusaha kelapa sawit untuk hanya membeli dan menggunakan bibit yang dihasilkan lembaga yang ditunjuk. Namun perlu juga kiranya diperhatikan agar harganya tidak memberatkan khususnya petani kecil.

Bahan-bahan masukan lainnya yang penting adalah pupuk, herbisida dan insektisida yang pengadaannya dilakukan melalui industri dalam negeri maupun import. Dalam hal ini pemerintah menetapkan harga pupuk secara teratur melalui peran penting dalam distribusi dan pemasaran pupuk yang dilakukan oleh perusahaan milik negara.

» **Sub Sistem Produksi Perkebunan (*Farm Production*)**

- Perkembangan Areal Perkebunan Kelapa Sawit  
Perkebunan besar swasta mulai digalakkan di Indonesia pada awal 1980-an. Perkebunan besar kelapa sawit mengalami perkembangan besar selama 20 tahun terakhir. Diantara komoditi perkebunan komersial, tanaman kelapa sawit dapat dikatakan primadona terutama pada tahun 1990-an. Luas areal perkebunan kelapa sawit menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa.

Pada tahun 1967 luas areal perkebunan kelapa sawit hanya 105.808 ha dan tahun 1998 sudah mencapai 2.633.899 ha, sebagaimana terlihat pada tabel berikut yang menunjukkan angka pertumbuhan pertahunnya mencapai 11,1 %.

Tahun	Perkebunan Negara	Perkebunan Swasta	Perkebunan Rakyat	Total
1967	65.573	40.235	0	105.808
1970	86.640	46.658	0	133.298
1980	199.538	88.847	6.175	139.103
1990	372.246	403.093	291.338	152.059
1991	395.183	531.219	384.594	1.310.996
1992	389.761	638.241	439.468	1.467.470
1993	380.746	730.109	502.332	1.613.187
1994	386.309	845.296	572.544	1.804.149
1995	404.732	961.718	658.536	2.024.986
1996	426.804	1.083.823	738.887	2.249.514
1997	443.008	1.194.521	824.198	2.461.827
1998	476.645	1.276.214	881.040	2.633.899

Sumber : PDBI 1998

Struktur kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit didominasi oleh Perusahaan Besar Milik Negara maupun Milik Swasta dengan luas mencakup 66 %. Dimasa datang selisih proporsi kepemilikan lahan antara pengusaha besar dan rakyat akan semakin membesar seiring dengan besarnya investasi dari kalangan swasta dan peningkatan permintaan areal perkebunan besar kelapa sawit melalui *Konversi Hutan*. Setiap tahun diperkirakan sebesar 330.000 ha laus hutan yang dikonversikan menjadi perkebunan besar kelapa sawit (*Kartodiharjo, 1999*). Hal ini harus diperhatikan sejak sekarang sehingga kepemilikan lahan menjadi lebih berimbang sehingga mampu menopang usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan meningkatkan rasa keadilan.

Saat ini perkembangan perkebunan kelapa sawit telah diarahkan pada Kawasan Timur Indonesia. Mengingat ketersediaan lahan di Sumatera yang makin menyempit. Hal ini juga bertujuan meningkatkan pemanfaatan lahan yang memiliki potensi tinggi di Daerah Indonesia Timur serta membuka peluang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada Daerah Indonesia Timur sehubungan kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan untuk mengadakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Kepemilikan perkebunan kelapa sawit yang lain dipegang oleh petani yang merupakan plasma-plasma dari perkebunan kelapa sawit negara (PTP). Skema

plasma dibentuk oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani dan dalam rangka distribusi pendapatan. Untuk itu setiap partisipan diberikan lahan 2,25 ha dimana 2 ha-nya sudah ditanami kelapa sawit.

Peserta plasma (500 – 2000 peserta) yang berlokasi disekitar perkebunan dilatih dan dididik oleh pihak PTP dalam mengelola dan menjalankan usaha lahan kelapa sawit mereka. Selain menyediakan lahan yang sudah ditanami perusahaan ini juga menyediakan sarana jalan, perumahan dan pabrik pengolahan. Fasilitas-fasilitas yang disediakan ini merupakan kredit yang harus dikembalikan oleh peserta dari produksi mereka dalam jangka waktu 10 – 15 tahun. Dengan kerjasama pekerja plasma dan perusahaan ini diharapkan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Hingga saat ini memang masih banyak terdapat masalah dalam skema ini misalnya masih banyak plasma yang masih belum mampu meningkatkan kesejahteraannya (hanya mampu menerima pendapatan Rp. 100.000,-/bulan) sehingga ada kalanya plasma yang menjual hasil produksinya kepada pihak ketiga yang mereka anggap menawarkan harga yang lebih tinggi.

#### - **Investasi Baru Perkebunan Besar Kelapa Sawit**

Investasi besar di usaha perkebunan besar kelapa sawit di Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini meningkat luar biasa. Baik investasi dalam bentuk PMDN maupun PMA, terutama Malaysia. Kekhawatiran yang timbul akibat dominasi investasi di perkebunan besar ini dan untuk memberikan ruang gerak bagi investor dalam negeri, maka pemerintah pada bulan Maret 1997 mengeluarkan kebijakan untuk menutup keran masuknya investasi asing di perkebunan. Awal 1997, PMA untuk perkebunan besar luasnya sudah mencapai 40 % dibanding investasi dalam negeri.

Namun akibat kesepakatan paket bantuan RI-IMF (butir 39) investasi asing di perkebunan besar sawit harus dibebaskan dan diberikan peluang sama dengan investor dalam negeri melalui INPRES No. 6/1998 tertanggal 21 Januari 1998. Kebijaksanaan pemerintah membekukan sementara investasi PMA di perkebunan kelapa sawit sempat mengundang berbagai kecurigaan.

#### **Alasan keluarnya kebijakan ini ialah :**

- Memperkuat pengusaha dalam negeri di sektor kelapa sawit dan tidak menghendaki peran strategis ini dikuasai oleh investor asing.
- Kekhawatiran pemerintah bahwa investasi asing hanyalah untuk perluasan perkebunan yang mampu menghasilkan kelapa sawit (tandan buah segar) yang akan mereka jadikan sebagai bahan baku industri mereka, sementara pemerintah berkeinginan agar hasil perkebunan kelapa sawit dapat mendukung berkembangnya dunia industri Indonesia yang tentunya diharapkan dapat memberikan nilai tambah (devisa) serta mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
- Investor asing umumnya tidak berkeinginan menjalin kerjasama dengan petani kelapa sawit sebagai plasma

Namun ternyata kebijakan baru ini dapat disinyalir akan menimbulkan monopoli baru, penguasaan sektor kelapa sawit di tangan sejumlah pengusaha tertentu. Sebab dengan dibekukannya PMA, maka hanya beberapa pemodal besar dalam negeri yang mampu melakukan investasi, seperti Group Salim, Sinar Mas, dan Raja Garuda Mas.

Dalam pandangan *Didik J. Rachbini*, bahwa industri minyak sawit merupakan contoh konkret dari paradoks yang masih dihadapi ekonomi Indonesia yang mengarah kepada *Open Economy*. Pada satu sisi industri ini mempunyai daya saing yang tinggi di pasar internasional karena keunggulan komparatif alamiah yang dimilikinya tetapi di pihak lain industri ini mengalami dilema struktural karena industri hilirnya terjebak dalam pasar monopoli atau duopoli. Kondisi ini diperparah bahwa kelompok besar yang dominan dalam industri juga mengintegrasikan secara vertikal mulai dari industri kelapa sawit hingga pengolahannya. Investasi kelapa sawit di Indonesia memang sangat menarik, karena potensi luas areal yang sangat luas. Data yang dikeluarkan oleh BKPM menunjukkan bahwa antara 1995 – 1997 investasi baru bidang ini mencapai 325 proyek yang terdiri dari 316 PMDN dengan nilai investasi 48,8 trilyun dan 9 PMA dengan nilai US\$ 961 juta. Investasi baru perkebunan kelapa sawit ini pada umumnya terpadu dengan industri pengolahannya.

Kapasitas Investasi Baru dalam Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit  
(Periode Januari 1995 – Desember 1997)

Keterangan	Nilai
Proyek	325
Investasi PMDN (dalam Juta Rp.)	48.852.648
Investasi PMA (dalam 000 US\$)	961.686
Areal (ha)	6.245.515
Kapasitas CPO (ton/th)	29.869.320
Kapasitas PKO (ton/th)	6.781.094

**Sumber : PDBI 1998**

Penyebab daya tarik investasi kelapa sawit adalah selisih keuntungan yang besar karena biaya produksi di Indonesia masih termasuk yang terendah khususnya biaya tenaga kerja. Namun dengan garis kebijaksanaan pemerintah yang selalu berubah-ubah dikhawatirkan investor asing akan menahan diri untuk menanamkan modalnya dan hal ini tentunya akan sangat merugikan khususnya pada saat ini dimana bangsa Indonesia sangat membutuhkan modal yang besar dalam usaha mengelola potensi kelapa sawit sehingga mampu membantu memulihkan krisis yang dialami bangsa Indonesia sekarang ini.

» **Primary Processing**

Buah segar yang baru dipetik dari pohon sawit harus diproses dalam 20 – 24 jam. Untuk alasan ini maka pabrik pengolahan dan perangkat transportasi merupakan faktor penentu bagi kualitas minyak sawit. Dengan alasan inilah mengapa PTP dan Perusahaan Swasta Asing membangun pabrik dalam area perkebunan mereka.

Sementara itu perusahaan swasta nasional hanya beberapa yang memiliki pabrik pengolahan sehingga mereka masih memiliki kapasitas pengolahan yang tidak dimanfaatkan yang ternyata dapat digunakan oleh perusahaan perkebunan yang tidak memiliki pabrik pengolahan sendiri. Namun yang menjadi kendala adalah jarak antara kebun-kebun yang cukup jauh dari pabrik pengolahan yang ada. Meningkatnya lahan yang produktif merupakan salah satu pendorong munculnya masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini pihak PTP mengambil langkah untuk membangun dan mengembangkan pabrik pengolahan di setiap wilayah.

» **Downstream Industries**

Dalam memenuhi kebutuhan konsumsi Indonesia untuk berbagai komoditas yang berasal dari CPO maka pemerintah meningkatkan pembangunan industri hilir minyak sawit. Yang dirasakan paling penting untuk segera dibangun adalah pembangunan pabrik pengolahan CPO untuk menghasilkan minyak goreng, hal ini didorong oleh keadaan produksi kopra yang tidak cukup lagi untuk *supply* bahan baku pembuatan minyak goreng.

Kemudian seiring dengan meningkatnya produksi minyak sawit dan dalam rangka memperoleh nilai tambah dari perolehan nilai tambah dari perolehan ekspor telah menyebabkan perusahaan-perusahaan industri minyak sawit merasa lebih baik mengekspor produk yang telah diproses daripada sekedar CPO. Meskipun usaha-usaha ini tidak seluruhnya berhasil tampaknya permintaan atas produk minyak sawit yang lebih beragam semakin meningkat. Industri hilir yang menggunakan bahan baku CPO adalah industri minyak goreng, margarine dan oleochemical.

**Berdasarkan data yang ada pada tahun 1995 keadaan industri tersebut adalah :**

- o Industri minyak goreng meliputi 53 perusahaan dengan kapasitas produksi 4.435.720 ton per tahun dan volume produksi 1.832.000 ton dengan total kebutuhan CPO 260.000 ton
- o Industri margarine meliputi 31 perusahaan dengan kapasitas produksi 423.179 ton per tahun dan volume produksi 75.000 ton
- o Industri oleochemical meliputi 8 perusahaan dengan kapasitas produksi 513.700 ton per tahun dan volume produksi 526.000 ton dengan total kebutuhan CPO 1.051.000 ton

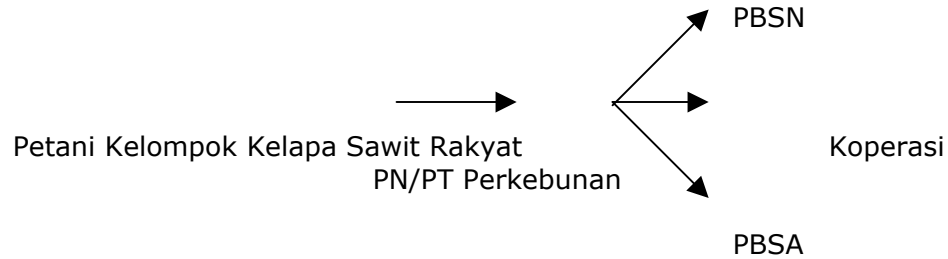
Peluang untuk mengembangkan industri ini tampaknya masih terbuka lebar khususnya dengan memperhatikan persediaan CPO yang banyak dan akan tetap meningkat pada tahun-tahun yang akan datang. Pada tahun 1996 produksi CPO Indonesia yang tercatat 4.746.800 ton sedangkan kapasitas produksi industri hilir hanya meliputi 3.651.000 ton. Oleh karena itulah pemerintah terus mendorong investor untuk menanamkan modal mereka pada industri hilir ini disamping usaha perkebunan kelapa sawit.

Untuk pengusaha nasional sendiri kiranya perlu membenahi diri untuk dapat bertahan di arus persaingan yang semakin ketat. Dengan masuknya investor asing khususnya dari Malaysia yang memiliki keahlian yang lebih baik dalam industri minyak sawit dan turunannya disadari perlu peningkatan kemampuan dalam penguasaan teknologi pengolahan kelapa sawit menjadi produk turunan yang tentunya memiliki nilai ekonomi, yang lebih tinggi, sehingga tidak semata-mata menggantungkan keunggulan biaya murah kepada rendahnya biaya tenaga kerja.

» **Pemasaran**

o Saluran Pemasaran

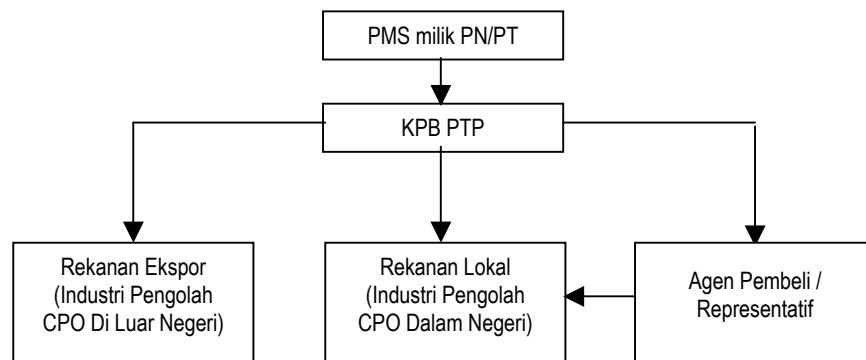
- Saluran Pemasaran TBS dari Kelompok Petani Rakyat adalah :



- Saluran Pemasaran TBS dari petani plasma anggota PIR-BUN

Petani Plasma → Kontrak → Koperasi → PN/PT Perkebunan

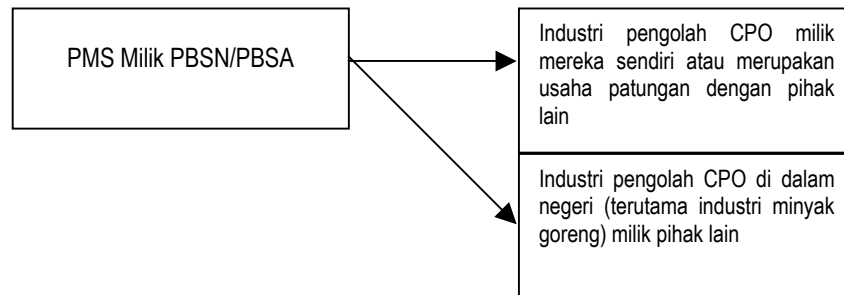
- Saluran Pemasaran Minyak Sawit di PN/PT



Kantor pemasaran bersama yang sekarang telah berubah menjadi pusat pemasaran sawit (PPS) dipandang sebagai alat perah PTP karena diduga ada terjadinya pemotongan hasil penjualan oleh KPB. Sebuah penemuan menyebutkan bahwa selama ini KPB telah memotong hasil penjualan CPO milik PTP sebesar 20 %. Dengan penemuan-penemuan ini sebenarnya sudah diusulkan lembaga ini dibubarkan saja. Jadi nantinya komoditas PTP termasuk CPO akan dipasarkan secara langsung oleh masing-masing perkebunan yang menghasilkan. Dengan jalan ini diharapkan PTP dapat meningkatkan keuntungan dua kali lipat.

Sementara itu KPB sendiri hendaknya dikembalikan kepada fungsinya semula sebagaimana direncanakan pada waktu pembentukannya, yaitu sebagai lembaga penelitian pasar. Mereka melakukan investigasi seputar komoditas yang diperdagangkan dipasaran dunia. Dengan cara ini dapat diketahui kapan saat CPO akan membanjiri dunia atau bagaimana kondisi panen yang terjadi di negara-negara produsen pesaing lainnya. Informasi-informasi ini setelah dianalisa akan diberikan kepada PTP sebagai modal negosiasi dengan pembeli.

- Saluran Pemasaran Minyak Sawit di PN/PT



#### o **Perkembangan Ekspor**

Sebelum tahun 1978 kebanyakan produk minyak sawit adalah untuk keperluan ekspor. Pada masa tersebut tidak ada peraturan pemasaran kecuali peraturan pajak ekspor yang secara regular disesuaikan dengan fluktuasi harga.

Selama masa 1978 – 1991 diadakan pengaturan pemasaran dengan tujuan untuk menyediakan CPO bagi industri hilir. Dengan kebijaksanaan ini maka terdapat 3 jenis harga yang berlaku, yaitu :

- Harga ekspor untuk komoditas ekspor yang diterima oleh ekspor yang ditunjuk
- Harga yang ditetapkan pemerintah untuk persentase tertentu dari produk PTP, perusahaan asing dan perusahaan nasional
- Harga pasar domestik

Pemasaran CPO memiliki potensi yang besar karena produk CPO memiliki beberapa keuntungan dibanding dengan minyak nabati lainnya seperti minyak kacang kedelai dan minyak bunga matahari. Keuntungan ini didapat dari aspek produksi dimana CPO diproduksi dengan jumlah yang lebih banyak dari minyak nabati lainnya dan dengan harga yang lebih murah.

Selain keuntungan komparatif tersebut khusus untuk Indonesia sendiri ditambah dengan ongkos produksi yang lebih rendah dari negara penghasil lainnya :

- Biaya produksi CPO di Indonesia berkisar pada US\$ 150 – 180 / ton
- Biaya produksi CPO di Malaysia berkisar pada US\$ 220 / ton
- Biaya produksi minyak kacang kedelai US\$ 480 / ton

Volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia yakni produk CPO dan KPO terus mengalami peningkatan yang berarti. Antara tahun 1990 – 1995 angka pertumbuhan rata-rata 11,9 % per tahun untuk produk CPO dan 24,2 % per tahun untuk nilainya. Sedangkan untuk PKO volumenya mengalami pertumbuhan rata-rata mencapai 17,5 % per tahun dan nilainya tumbuh rata-rata 35,4 % per tahun.

Namun dengan kasus pencemaran 90.000 ton CPO dengan minyak solar yang diekspor ke Amsterdam agak mengganggu kinerja ekspor komoditas ini. Walaupun kasus ini tidak menyebabkan pihak pembeli memutuskan hubungan dengan produsen Indonesia, namun hal ini harus dapat diantisipasi. Bukan hanya gangguan pencemaran tapi juga gangguan-gangguan lain yang menghalangi kelancaran kinerja pemasaran seperti penjarahan hasil-hasil yang siap dipasarkan di tengah perjalanan.

- **Pajak Ekspor CPO**

Pemerintah mengenakan pajak ekspor terhadap produk minyak kelapa sawit dan turunannya sejak September 1994. Ketika terjadi krisis ekonomi 1997, pasokan CPO dalam negeri mengalami kelangkaan sehingga harga minyak goreng meningkat tajam. Pada waktu itu pemerintah menurunkan pajak ekspor dari sekitar 10 % - 12 % menjadi 2 % - 5 % melalui paket deregulasi Juli 1997, sehingga produsen berlomba melakukan ekspor untuk mendapatkan devisa sebesar-besarnya, apalagi nilai rupiah mengalami depresiasi tajam terhadap dollar AS. Dalam mengamankan pasar dalam negeri, maka pemerintah menempuh langkah melarang ekspor CPO dan turunannya pada 7 Januari 1998.

Kesepakatan RI dengan IMF menghancurkan pemerintah membuka kran ekspor bagi pengusaha secara bebas di pasar internasional. Namun tetap dikenakan pajak ekspor sesuai SK Menkeu No. 242/KMK.01/1998 tanggal 22 April 1998 dimana besarnya pajak ekspor CPO adalah 40 %. Pada bulan Juli 1998 pemerintah menaikkan pajak ekspor CPO menjadi 60 % melalui SK Menkeu No. 334/KMK.017/1998 tanggal 7 Juli 1998. Namun ironisnya, harga rata-rata minyak goreng pada bulan Juli 1998 Rp. 7.100/kg atau naik sebesar 54,5 % dari harga satu bulan sebelumnya, yakni Rp. 4.600/kg pada tingkat harga eceran.

Pada akhir Januari 1999 pemerintah menurunkan pajak ekspor CPO dari 60 % menjadi 40 % lewat SK Menkeu 30/KMK.01/1999 tertanggal 29 Januari 1999, dan harga pasaran minyak goreng tidak mengalami gejolak. Dan melalui SK Menkeu No. 181/KMK.017/1999 tertanggal 3 Juni 1999 pemerintah menurunkan pajak ekspor CPO menjadi 30 %. Pajak ekspor CPO dan produk turunannya selalu berubah-ubah dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Memang sesuai dengan kesepakatan RI - IMF butir 39, maka pemerintah berkewajiban menurunkan pajak ekspor sampai 10 % pada akhir Desember 1999.

Dalam rentang waktu setahun lebih, pajak ekspor mengalami perubahan sampai 5 kali. Ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan serta cermin kepanikan pemerintah dalam menghadapi pasar CPO internasional yang tidak stabil. Menurut catatan Indef (1996) bahwa situasi pasar minyak goreng dalam negeri berjalan sangat oligopolistik. Sekitar 60 sampai 65 persen pangsa pasar minyak goreng domestik dikuasai oleh dua kelompok perusahaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari perkebunan pengolahan CPO, industri minyak goreng hingga pemasarannya. Dalam situasi pasar seperti ini, akan teramat sulit mengharapkan berbagai macam kebijakan bekerja secara efektif untuk mempengaruhi harga minyak goreng dalam negeri, termasuk melalui kebijakan pajak ekspor.

Ketika pajak ekspor CPO digunakan sebagai alat untuk menstabilkan harga di dalam negeri dan menghambat laju ekspor oleh pengusaha, ternyata tidak begitu efektif. Harga minyak goreng di dalam negeri tetap tinggi. Namun ketika pajak ekspor diturunkan, maka harga CPO di pasar internasional menunjukkan kecenderungan turun. Akhir Juli 1999 pemerintah terpaksa menurunkan harga patokan ekspor CPO menjadi 120 dollar AS per metrik ton karena merosotnya harga minyak sawit di pasar internasional, meskipun pajak ekspor hanya 10 %. Padahal pertengahan 1998, harga CPO di pasar internasional mencapai 700 dollar AS per metrik ton, dengan pajak ekspor 60 %. Tidak efektifnya pengenaan pajak ekspor disebabkan banyaknya beredar CPO ilegal di pasar internasional selundupan dari Indonesia.

- **Pajak Ekspor Merampok Rezeki Petani**

Pengenaan pajak ekspor terhadap produk minyak sawit dan turunannya, dapat dilihat sebagai bentuk perampokan terhadap rezeki yang semestinya dinikmati petani. Dalam rentang waktu Juli – Desember 1998 ketika PE CPO sebesar 60 % telah mengakibatkan kerugian ekonomis yang mencapai 11,8 triliun bagi perkebunan dan petani kelapa sawit, Pajak ekspor dengan dalih peningkatan nilai tambah, kesempatan kerja dan daya saing harus ditinjau ulang. Sebab disisi lain, tindakan tersebut menyebabkan petani dibajak atau terbajak oleh pemerintah (Kompas, 3 Juli 1999). Dan dalam kenyataannya untuk mensiasati pengenaan pajak ekspor tersebut, banyak diantara pengusaha yang melakukan ekspor CPO gelap, sehingga mereka tetap bisa meraup keuntungan yang besar, sedangkan petani tetap tidak mendapatkan bagian keuntungan tersebut.

Selama ini petani perkebunan kelapa sawit tidak pernah merasakan rezeki dari nilai harga produk kelapa sawit di pasar internasional. Adanya PE yang tinggi, berujung pembebanan pada petani dimana harga pembelian tandan buah segar (TBS) dari petani oleh pengusaha tetap rendah atau tidak ada penyesuaian harga. Semstinya pemerintah harus mengembalikan dana Rp. 11,8 triliun yang ditarik dari PE minyak sawit tersebut kepada petani yang nasibnya tidak pernah beranjak membaik.

- **Penyeludupan CPO**

Menurut pelaku ekspor CPO dari Medan, pada tahun 1998 CPO yang diseludupkan tidak kurang dari 1 juta ton. Angka ini mendekati ekspor resmi yang Cuma 1,4 juta ton, sehingga pengusaha lebih memiliki keuntungan berlipat dari ekspor gelap ini. Dengan mengeluarkan uang US25 dari setiap ton CPO kepada pejabat yang bertugas mengawasi lalu lintas, maka ekspor CPO-pun berjalan tanpa hambatan. Akibatnya harga minyak goreng dalam negeri tetap melangit (Kompas No. 37, 14 Juli 1999). Bahkan ada pedagang sawit di Medan mengungkapkan bila membutuhkan sekitar 10.000 ton saja setiap hari, maka produk sawit illegal asal Indonesia bisa didapatkan di Malaysia (BI, 10 Juni 1999).

Penguasaha lebih memiliki keuntungan berlipat dengan nelakukan praktek ekspor gelap, sehingga dapat dikatakan bahwa pengenaan pajak ekspor tidak berjalan efektif karena pengusaha lebih memilih jalan pintas dengan menyeludupkan CPO ke luar negeri dan sangat tergantung pada pasok dan permintaan di pasar internasional. Praktek penyeludupan ini merupakan bentuk korupsi uang negara dan merampok hak petani kelapa sawit.

- **Distribusi dan Penetapan Harga Minyak Goreng**

Harga minyak goreng yang meningkat selama masa krisis moneter menjadi pendorong ditetapkannya pajak ekspor untuk menghambat laju ekspor sehingga persediaan dalam negeri tercukupi dan diharapkan harga minyak goreng menjadi murah. Kenyataannya walaupun pajak ekspor dinaikkan harga minyak goreng tetap tinggi. Dalam rangka menstabilkan harga minyak goreng, maka Bulog melakukan intervensi pasar. Hal ini dilakukan melalui penghimpunan CPO yang dijadikan stok penyangga yang kemudian diolah menjadi minyak goreng melalui kerjasama pengolahan dengan pihak swasta. Tindakan ini ternyata memiliki akibat yang hampir sama dengan kebijakan Pajak Ekspor (PE) yaitu menurunkan harga CPO sehingga petani karena sebagian stok tersebut diperoleh dari hasil

pengolahan tandan buah segar milik petani. Bulog sebenarnya lebih tepat jika menghimpun stok minyak goreng bukan CPO.

Penentuan harga CPO domestik yang diawali dengan "pemberitahuan" dari kantor Deperindag dan Bulog kepada KPB PTP. Berbekal surat pemberitahuan tersebut KPB PTP menjual CPO di pasar domestik dengan tingkat harga pemberitahuan sebagai acuan. Namun data mengenai kebijakan harga ini tidak bisa diketahui publik secara transparan. Kebijakan harga ini bersifat distortif dalam arti bersifat bias ke bawah sehingga perlu dieleminasi.

Kemudian disinyalir distribusi minyak goreng yang tidak baik sehingga ditunjuklah Koperasi Distribusi Indonesia (yang dipimpin oleh orang-orang yang super sibuk) untuk menangani distribusi minyak goreng ini. Masalah yang timbul kemudian ternyata pelaku bisnis swasta mampu menyalurkan minyak goreng lebih murah daripada yang ditetapkan KDI. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa swasta menjalankan kartel dengan cara kerja dumping untuk membunuh usaha koperasi. Hal ini belum tentu benar karena mungkin saja pihak swasta membanjiri pasar domestik karena harga internasional memang sedang menurun.

Dari kondisi ini tampak jelas bahwa pemerintah belum memiliki pegangan yang jelas dalam penanganan masalah seputar pemasaran hasil kelapa sawit (CPO dan turunannya).

### **3. Sub Sistem Pendukung Sistem Agribisnis Kelapa Sawit**

Dalam usaha mencapai suksesnya sistem agribisnis kelapa sawit sangat diperlukan ketersediaan sub-sistem pendukung yang meliputi :

#### **□ Research and Development**

Sejak tahun 1961 telah ada 2 pusat penelitian yaitu RISPA (*Risearch Institute of Sumatera Planters Association*) dan MRS (*Marihat Research Centre*) yang mengadakan penelitian dan pengembangan tanaman sawit dan pemrosesan produksinya. Kontribusi dari kegiatan riset dan pengembangan ini telah mampu meningkatkan produktivitas minyak sawit dari 3 - 3,5 ton CPO/ha/tahun pada 10 tahun yang lalu menjadi 5 - 6 ton/ha/ha/tahun pada saat ini.

Selain menemukan bibit kelapa sawit yang mampu memberikan hasil yang baik, pusat penelitian juga telah mampu menemukan :

- Metode perlindungan tanaman
- Agronomi seperti agroclimatolog dengan memanfaatkan hormon untuk menipiskan patron (pelindung buah)
- Pemilihan Ortet sebagai lapisan untuk kultur jaringan
- Pemetaan tanah dan metode pemupukan lahan
- Teknologi pasca panen seperti pengawasan mutu tangkai buah segar

#### **□ Education and Extension**

Selain pendidikan yang diperoleh dari sekolah/universitas juga diadakan training dan kursus-kursus singkat yang dilaksanakan oleh pengelola perkebunan itu sendiri. Sebagai contoh PTP telah mendirikan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan untuk karyawannya dan pusat-pusat penelitian secara teratur mengadakan seminar dan pelatihan-pelatihan.

Untuk layanan yang luas dapat diperoleh melalui buletin, brosur-brosur, dan publikasi khusus yang dapat diperoleh produsen dengan biaya ringan. Pertemuan khusus antara perusahaan inti dan plasma juga diadakan untuk mendemonstrasikan cara-cara pengelolaan perkebunan yang tepat.

#### □ **Financial and Banking Services**

Untuk kebutuhan pembiayaan investasi baru pemerintah memberikan pinjaman khusus pada pihak PTP, pengusaha swasta nasional dan pengusaha PIR. Persyaratan pinjaman ini dilakukan untuk jangka panjang dan dengan tingkat bunga yang rendah. Ada juga pinjaman yang didukung oleh ADB dan Bank Dunia.

Beberapa bank umum nasional juga menyediakan pinjaman bagi perusahaan perkebunan nasional dalam membangun perkebunan baru dan pabrik pengolahan. Bagian peran serta bank umum ini tentunya masih kecil disebabkan tingginya suku bunga pinjaman yang berlaku saat ini. Juga yang sangat perlu diperhatikan adalah birokrasi pemberian pinjaman bagi pengusaha perkebunan kecil (yang tidak memiliki akses dengan pemegang kekuasaan) hendaknya dihindarkan, sementara itu pemberian pinjaman dalam jumlah yang sangat besar bagi perusahaan besar juga hendaknya perlu mendasarkan kepada prinsip kehati-hatian.

#### □ **Producers and Farmers Association**

Sejak tahun 1981 Asosiasi Penghasil Minyak Sawit telah berdiri. Tujuan dan kegiatan asosiasi ini antara lain :

- Mengadakan permohonan dan rekomendasi kepada pemerintah contohnya peningkatan sistem pemasaran dan peraturan tata tanah.
- Membangun kerjasama yang lebih erat antara sesama penghasil minyak sawit.
- Meningkatkan kerjasama dengan KLCE (Kuala Lumpur Commodity Exchange) dalam rangka membangun lembaga serupa di Indonesia.
- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian.

Untuk kelompok petani plasma telah didirikan koperasi-koperasi yang dapat dipandang sebagai Asosiasi mereka. Pendirian koperasi ini hendaknya didukung oleh perusahaan inti dan pemerintah. Manager atau pemimpin koperasi mewakili kelompok tani dalam transaksi pembayaran kembali kredit ke perusahaan inti. Banyak koperasi yang sudah berdiri dengan baik, mereka telah memiliki truk sendiri dan memiliki tabungan bersama yang cukup besar.

Kelemahan-kelemahan yang masih dihadapi oleh Asosiasi Produsen/petani kelapa sawit adalah :

- Masih banyak perusahaan dan koperasi yang belum terwakili dalam asosiasi produsen
- Masih banyak petani yang belum menjadi anggota koperasi atau kelompok tani

#### □ **Government Support**

Sebagaimana digambarkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kepentingan yang besar dalam pengembangan industri minyak sawit di Indonesia. Peran pemerintah ini meliputi :

- Menyediakan pinjaman lunak pada penghasil minyak sawit
- Membangun infrastruktur seperti jalan, listrik, pelabuhan dan jaringan telekomunikasi

- Menyediakan jaminan bagi kegiatan khusus seperti pembukaan PIR
- Pengurangan pajak bagi investasi dan masuknya barang-barang modal
- Memajukan industri hilir melalui berbagai kebijakan
- Mengadakan koordinasi institusi-institusi pemerintah untuk program-program pengembangan
- Memelihara iklim usaha yang kondusif seperti peraturan tata tanah dan peraturan perpajakan
- Khususnya pada masa sekarang ini dimasa ketika umumnya perkebunan mengalami kemunduran kinerja karena kerusakan lahan (tanaman yang sudah tidak produktif, perawatan tanaman seperti pemupukan, pemberantasan hama yang terkendala karena kekurangan dana) serta sarana dan prasarana yang mendukung (jalan, listrik, air, tempat penampungan) mengalami kerusakan dan tidak memperoleh perbaikan selama masa krisis, maka pemerintah diharapkan dapat membantu membenahi hal tersebut dengan memberikan bantuan dana yang dulunya terkumpul dari penarikan ekspor CPO.

Dimasa yang akan datang peran pemerintah ini masih sangat berperan dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menunjang keberhasilan sistem agribisnis kelapa sawit. Diharapkan pemerintah dapat mengeluarkan kebijaksanaan yang sepenuhnya berdasarkan kepada pendekatan sistem bukan kepada kepentingan golongan tertentu.

## **D. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

#### **Sistem Agribisnis Kelapa Sawit Indonesia memiliki kondisi :**

- ☑ Sub-Sistem Pengadaan Input Produksi  
Dapat dikatakan tidak memiliki hambatan yang besar dengan penemuan dan ketersediaan bibit tanaman yang bermutu, juga ketersediaan pupuk, pestisida, herbisida dan bahan pendukung lainnya.
- ☑ Sub-Sistem Produksi Pertanian  
Sub-sistem ini mengalami kemajuan yang pesat ditandai dengan penambahan luas areal dan hasil produksi yang semakin meningkat
- ☑ Sub-Sistem Processing  
Pendirian pabrik pengolahan yang masih terhenti kepada CPO, minyak goreng sementara hasil kelapa sawit ini memiliki turunan yang sangat banyak jenisnya dan hasil minyak sawit hilir ini membutuhkan teknologi dan modal yang besar.
- ☑ Sub-Sistem Pemasaran  
Kegiatan pemasaran hasil kelapa sawit ini masih sangat rentan terhadap perubahan harga dan akibat dari hal ini pihak yang paling sering dirugikan adalah pihak petani kelapa sawit.
- ☑ Sub-Sistem Pendukung  
Sampai sejauh ini subsistem pendukung seperti institusi penelitian, pendidikan sudah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi perkembangan sistem agribisnis kelapa sawit, walaupun masih perlu

belajar lebih lagi kepada keberhasilan negara-negara lainnya dalam penemuan teknologi dalam penanganan kelapa sawit. Sementara itu support pemerintah masih dirasakan kurang dan bahkan seringkali kebijaksanaannya dirasakan menghambat dan merugikan para pihak pelaku usaha dalam bidang agribisnis kelapa sawit.

## 2. Saran

- ☑ Sub-Sistem Input Produksi  
Pemerintah turut serta secara aktif dalam mendukung ketersediaan input produksi baik dalam jumlah, mutu maupun harga.
- ☑ Sub-Sistem Produksi Pertanian
  - Sosialisasi penggunaan input pertanian (seperti bibit) yang memiliki mutu yang baik telah tersedia.
  - Dukungan terhadap pembukaan areal baru dengan tetap mengindahkan kelestarian lingkungan hidaup. Dan menetapkan bahwa pembukaan areal baru oleh investor asing harus dikaitkan dengan pendirian pabrik hilir pengolah hasil kelapa sawit.
  - Peningkatan kerjasama yang adil antara perusahaan besar (inti) dengan petani kelapa sawit kecil (plasma) sehingga mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
- ☑ Sub-Sistem Processing  
Pemberian incentive dan kemudahan bagi pengusaha yang mendirikan pabrik hilir pengolahan hasil kelapa sawit.
- ☑ Sub-Sistem Pemasaran
  - Mendukung pemasaran hasil kelapa sawit khususnya untuk ekspor sehingga mampu menyumbangkan devisa bagi negara.
  - Menyerahkan kinerja pemasaran ekspor kepada kondisi pasar (demand dan supply). Untuk menghindari distorsi harga dan bias ke bawah yang sangat merugikan petani.
  - Membangun suatu sistem informasi dalam bidang agribisnis kelapa sawit sehingga para pelaku bisnis dapat menganalisa dan membuat keputusan yang tepat berkenaan dengan pengelolaan usaha dalam bidang ini.
  - Menjaga keamanan hasil kelapa sawit sepanjang rantai proses produksi, pemasaran hingga sampai ketangan konsumen baik dalam keamanan jumlah dan mutu.
- ☑ Sub-Sistem Pendukung
  - Kebijakan pemerintah yang konsisten yang berdasarkan kepada pendekatan sistem agribisnis bukan kepada kepentingan satu atau beberapa golongan tertentu.
  - Pemberian izin bagi PMA tetap dibuka namun dikaitkan dengan kewajiban pembukaan atau pendirian pabrik hilir pengolahan hasil perkebunan yang dibuka.
  - Penghapusan pembatasan-pembatasan ekspor hanya semata-mata dengan alasan pertimbangan kebutuhan konsumen dalam negeri.
  - Kepastian hukum dalam berusaha.

- Pemberian jaminan keamanan dalam berusaha dengan turut aktif dalam memberantas gangguan-gangguan keamanan berupa pencurian, penjarahan, sabotase, yang dilakukan pihak-pihak ketiga sepanjang proses produksi dan pemasaran.
- Mendukung pembangunan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, pengangkutan, pelabuhan) bagi peningkatan kinerja usaha agribisnis kelapa sawit.